

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan sebuah negara adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang tinggi. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan sebuah kunci dan syarat bagi sebuah negara untuk menuju negara maju. Potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang dimiliki (Todaro, 2006).

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah. Dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menciptakan pendapatan daerahnya serta melakukan alokasi untuk prioritas pembangunan di daerahnya secara mandiri dan diharapkan dapat lebih meratakan pembangunan sesuai dengan potensi dan aspirasi lokal untuk mengembangkan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat diharapkan juga turut berperan menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menjadi objek pembangunan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu daerah dan juga kemajuan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Berdasarkan asas desentralisasi, pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dilakukan atas belanja modal. Pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan tersebut dalam bentuk alokasi belanja daerah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Salah satu hasil dari otonomi adalah daerah berhak mengatur jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut termasuk mengelola anggaran belanja daerah secara mandiri. APBD merupakan wujud implementasi pengelolaan keuangan daerah sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sepenuhnya dipegang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Komponen APBD mencakup sumber-sumber pendapatan daerah serta berbagai pengeluaran pemerintah daerah termasuk belanja sektor pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor lainnya, yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk investasi. Investasi pemerintah dalam pendidikan dan kesehatan akan menyebabkan peningkatan kualitas modal manusia (Jhingan, 2000).

Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Pada April 2018 badan pusat statistik (BPS) merilis Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2017. BPS menyatakan bahwa pada tahun

2017, IPM Indonesia mencapai angka 70,81 atau tumbuh sebesar 0,90% dibandingkan tahun 2016. Menurut standar UNDP dan BPS, IPM tersebut dikategorikan tinggi, tidak berubah sejak memasuki kategori tersebut pada 2016 lalu. Peningkatan terjadi di semua dimensi, baik dimensi kesehatan, pendidikan, maupun pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Bila diperhatikan secara nasional, pada tahun 2017 Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat ke 9 dari 34 Provinsi di Indonesia, dengan angka 71,24 atau lebih tinggi dari angka rata-rata nasional yaitu hanya 70,81 dengan arti bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat lebih baik jika dibandingkan secara rata-rata nasional (Badan Pusat Statistik, 2018).

Provinsi Sumatera Barat secara administratif terbagi menjadi 19 kabupaten/kota, dengan banyaknya jumlah kabupaten/kota tentunya akan memberikan gambaran mengenai pembangunan manusia yang bervariasi. Dalam rangka mewujudkan daerah dengan kualitas manusianya yang tinggi, pemerintah daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor tersebut untuk meningkatkan pembangunan manusia tidak hanya pada usaha peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan saja. Terdapat hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah yaitu produktivitas masyarakat (Sumatera Barat dalam angka, 2017).

Tinggi rendahnya produktivitas masyarakat akan berimbas pada pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan juga akan berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Jika dilihat pada tatanan masyarakat daerah, tingkat produktivitas masyarakat dapat dilihat dari nilai

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB yang tinggi menjadi salah satu prioritas pembangunan suatu wilayah, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan (Sunarni, 2017).

Lebih spesifiknya pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM misalnya yang tercermin pada realisasi belanja daerah untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam penelitian ini disamping belanja daerah untuk melihat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Dari uraian diatas penulis tertarik meneliti tentang “ *Dampak Pendapatan Domestik Regional Bruto(PDRB) dan Belanja Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2010-2017?
- b. Bagaimanakah pengaruh PDRB, belanja pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Mengetahui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat selama periode 2010-2017.
- b. Menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB, belanja pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik bersifat akademik maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas serta menambah pengetahuan pada studi ekonomi sumberdaya manusia khususnya dalam hal peningkatan pembangunan manusia.
- b. Memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan, serta dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
- c. Menjadikan hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan, literatur tambahan informasi, serta objek pertimbangan dan lain sebagainya

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mana terdiri dari data laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, data pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan, serta data perkembangan IPM di Provinsi Sumatera Barat. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini mengambil waktu penelitian dari tahun 2010 sampai 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup serta sistematika penulisan pada penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang mendukung penelitian, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, data dan sumber data, serta penjelasan mengenai model penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta metode analisis yang digunakan. Seterusnya penjelasan mengenai uji asumsi klasik dan pengujian statistik.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum daerah penelitian, keadaan geografis dan kondisi demografi daerah penelitian serta perkembangan variabel-variabel dalam penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang menjelaskan estimasi serta interpretasi hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dalam penelitian, serta saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.